

Top-Down and Bottom-Up Approach: Tinjauan Terhadap Isu Ketidakamanan Pangan Sudan Selatan

Marria Quenni Michaela, Imam Fadhil Nugraha

International Relations Department, Faculty of Social and Political Science, Hasanuddin University

ARTICLE INFO

Article history:

Received 15 June 2026

Revised 17 June 2026

Accepted 21 June 2026

Available online 22 June 2026

Keywords

food insecurity, human security, South Sudan, top-down, bottom-up



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Food insecurity in South Sudan represents a complex humanitarian crisis shaped by conflict, economic instability, and climate shocks, as well as the dynamics of power within humanitarian governance. This study examines the interaction between top-down and bottom-up approaches through the lens of human security using a qualitative explanatory method based on literature analysis. The findings show that top-down approaches, led by international organizations, are essential in delivering emergency aid and stabilizing short-term conditions. However, these interventions often rely on technocratic and universal frameworks that overlook local contexts, creating dependency and limiting long-term sustainability. In contrast, bottom-up approaches demonstrate that local communities are active agents who develop survival strategies through traditional agriculture, social networks, and livelihood diversification, despite facing resource constraints. This study argues that food insecurity in South Sudan is not merely a technical problem but a product of unequal power relations between global and local actors. By integrating both approaches within a human security framework, this research highlights the need to align international interventions with local realities. Sustainable solutions therefore require not only policy coordination but also greater local participation and a rebalancing of power in humanitarian governance.

ABSTRAK

Kerawanan pangan di Sudan Selatan merupakan krisis kemanusiaan kompleks yang dibentuk oleh konflik, ketidakstabilan ekonomi, dan guncangan iklim, serta dinamika kekuasaan dalam tata kelola kemanusiaan. Studi ini meneliti interaksi antara pendekatan top-down dan bottom-up melalui lensa keamanan manusia menggunakan metode penjelasan kualitatif berdasarkan analisis literatur. Temuan menunjukkan bahwa pendekatan top-down, yang dipimpin oleh organisasi internasional, sangat penting dalam memberikan bantuan darurat dan menstabilkan kondisi jangka pendek. Namun, intervensi ini seringkali bergantung pada kerangka kerja teknokratis dan universal yang mengabaikan konteks lokal, menciptakan ketergantungan dan membatasi keberlanjutan jangka panjang. Sebaliknya, pendekatan bottom-up menunjukkan bahwa masyarakat lokal adalah agen aktif yang mengembangkan strategi bertahan hidup melalui pertanian tradisional, jaringan sosial, dan diversifikasi mata pencaharian, meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya. Studi ini berpendapat bahwa kerawanan pangan di Sudan Selatan bukan hanya masalah teknis tetapi merupakan produk dari hubungan kekuasaan yang tidak setara antara aktor global dan lokal. Dengan mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut dalam kerangka keamanan manusia, penelitian ini menyoroti perlunya menyelaraskan intervensi internasional dengan realitas lokal. Oleh karena itu, solusi berkelanjutan tidak hanya membutuhkan koordinasi kebijakan tetapi juga partisipasi lokal yang lebih besar dan penyeimbangan kembali kekuasaan dalam tata kelola kemanusiaan.

PENDAHULUAN

Sudan Selatan merupakan salah satu negara termuda di dunia yang lahir setelah referendum pemisahan diri dari Sudan pada tahun 2011. Namun, kemerdekaan tersebut tidak sepenuhnya membawa stabilitas politik dan keamanan bagi negara ini. Konflik berkepanjangan yang telah berlangsung sejak sebelum kemerdekaan tidak sepenuhnya berakhir, melainkan terus berkembang dalam bentuk persaingan politik, konflik antara etnis, perebutan sumber daya, dan kekerasan menggunakan senjata di berbagai wilayah. Ketidakstabilan tersebut diperparah oleh lemahnya fungsi dari pemerintahan dalam menjalankan negara secara efektif, termasuk dalam menjaga keamanan, mengelola sumber daya, dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain

*Corresponding Author

Email: marriaquenni@gmail.com

itu, perekonomian Sudan Selatan juga berada dalam kondisi yang rentan karena tingginya ketergantungan terhadap sektor minyak sebagai sumber utama pendapatan negara. Ketika konflik meningkat dan produksi minyak ikut terganggu, kondisi ekonomi nasional ikut melemah dan berdampak langsung pada kesejahteraan kehidupan masyarakat (Cahyanti, 2017). Situasi pasca-konflik yang tidak stabil menjadikan Sudan Selatan sebagai salah satu negara dengan tingkat kerentanan kemanusiaan tertinggi di Afrika. Kondisi ini diperburuk oleh tingginya angka kemiskinan, kerusakan infrastruktur, perpindahan penduduk secara besar-besaran akibat konflik, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan mata pencaharian karena lemahnya perlindungan negara terhadap keamanan masyarakat (Lokosang et al., 2016).

Ketidakstabilan politik dan ekonomi berkontribusi besar terhadap krisis pangan yang berkepanjangan di Sudan Selatan. Krisis ini tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan produksi pangan, tetapi juga oleh konflik bersenjata, perpindahan penduduk, gangguan distribusi, inflasi, serta bencana iklim seperti banjir dan kekeringan. Konflik menyebabkan hilangnya akses masyarakat terhadap lahan, pasar, sumber pendapatan, dan bantuan kemanusiaan, sementara ketidakamanan wilayah menghambat distribusi bantuan secara merata. Di sisi lain, pelemahan ekonomi mendorong kenaikan harga pangan dan menurunkan daya beli, sehingga banyak rumah tangga mengandalkan strategi bertahan hidup yang tidak berkelanjutan (Lutvihana & Kusuma, 2023). Situasi tersebut menunjukkan bahwa krisis pangan di Sudan Selatan telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan kompleks dan berkepanjangan. Laporan dari *Integrated Food Security Phase Classification* (IPC) pada tahun 2026 memperkirakan sekitar 7,8 juta penduduk atau sekitar 55% populasi di Sudan Selatan mengalami ketidakamanan pangan akut, dengan lebih dari 73 ribu orang berada pada situasi yang sangat kritis atau kondisi kelaparan ekstrem. Selain itu, sekitar 2,2 juta anak mengalami malnutrisi akut akibat terbatasnya akses terhadap pangan, layanan kesehatan, dan fasilitas kebersihan yang layak (IPC, 2026). Kondisi ini memperlihatkan bahwa krisis pangan di Sudan Selatan berkaitan erat dengan lemahnya stabilitas politik, kerentanan ekonomi, serta rendahnya perlindungan keamanan manusia dalam situasi pasca-konflik.

Penanganan krisis pangan di Sudan Selatan selama ini banyak dilakukan melalui pendekatan *top-down* yang dijalankan oleh aktor-aktor internasional seperti *World Food Programme* (WFP), *Food and Agriculture Organization* (FAO), UNICEF, serta berbagai organisasi kemanusiaan internasional lainnya. Pendekatan ini berfokus pada pemberian bantuan pangan darurat, program nutrisi, bantuan finansial, serta intervensi kemanusiaan untuk menekan angka kelaparan dan malnutrisi. Dalam beberapa tahun terakhir, WFP secara aktif menyalurkan bantuan pangan kepada jutaan masyarakat yang terdampak konflik, termasuk melalui distribusi makanan, bantuan tunai, hingga pengiriman bantuan melalui jalur udara ke wilayah yang sulit diakses akibat dari konflik dan banjir (WFP, 2025). Selain bantuan darurat, organisasi internasional juga mulai mendorong program pembangunan ketahanan pangan melalui pembangunan kembali infrastruktur, pengembangan pertanian tahan banjir, serta program kemampuan adaptasi masyarakat. Namun, penerapan dari pendekatan ini masih menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan pendanaan, akses kemanusiaan yang dibatasi oleh konflik (Angel & Carrel, 2022), serta ketergantungan masyarakat terhadap bantuan internasional (WFP, 2025). Situasi tersebut menunjukkan bahwa bantuan internasional memiliki peran yang penting dalam menekan dampak krisis pangan, tetapi belum mampu menciptakan stabilitas pangan yang berkelanjutan di Sudan Selatan.

Sementara itu, kondisi krisis yang berkepanjangan mendorong munculnya berbagai pendekatan *bottom-up* yang dilakukan oleh komunitas lokal dan masyarakat yang terdampak secara langsung. Dalam situasi keterbatasan bantuan dan lemahnya kapasitas negara, masyarakat lokal berusaha membangun strategi untuk bertahan hidup melalui kegiatan pertanian nonkomersial, peternakan, penangkapan ikan, pemanfaatan bantuan komunitas, hingga membangun mekanisme solidaritas sosial antar masyarakat. Pendekatan *bottom-up* ini berkembang karena masyarakat lokal dianggap lebih memahami kebutuhan, kondisi geografis, dan tantangan sosial di wilayah mereka masing-masing (Sassi, 2021). Kemampuan rumah tangga dalam mempertahankan sektor pertanian, kepemilikan ternak, serta aktivitas perikanan menjadi

salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat di tengah krisis berkepanjangan (Lokosang et al., 2016). Selain itu, berbagai komunitas lokal juga mengembangkan strategi adaptasi terhadap banjir, perpindahan penduduk, dan keterbatasan akses pasar untuk mempertahankan sumber pangan mereka. Pendekatan berbasis komunitas ini memperlihatkan bahwa masyarakat lokal tidak hanya menjadi pihak penerima bantuan, tetapi juga merupakan aktor penting dalam menjaga keberlangsungan hidup di tengah situasi krisis.

Krisis pangan di Sudan Selatan menunjukkan bahwa ancaman yang dihadapi masyarakat tidak hanya berkaitan dengan konflik maupun stabilitas dari negara, tetapi juga menyangkut keamanan hidup manusia secara langsung. Konflik berkepanjangan telah menyebabkan masyarakat kehilangan akses terhadap pangan, layanan kesehatan, tempat tinggal, serta sumber mata pencaharian yang layak. Akibatnya, masyarakat sipil menjadi kelompok yang paling terdampak karena harus menghadapi ancaman kelaparan, malnutrisi, penyakit, hingga perpindahan penduduk yang masif secara paksa akibat dari konflik dan bencana iklim. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keamanan bagi negara tidak selalu sejalan dengan keamanan bagi masyarakat (Jyalita, 2023). Oleh karena itu, pendekatan *human security* menjadi relevan karena memberikan perhatian pada perlindungan dan kesejahteraan dimana manusia menjadi fokus utama keamanan, bukan hanya pada stabilitas politik negara.

Studi tentang krisis pangan di Sudan Selatan saat ini banyak berfokus pada perbedaan antara efisiensi institusi dan ketahanan rumah tangga. Tschunkert et al. (2023) memberikan kontribusi signifikan dalam menganalisis HDP. Mereka menyoroti bagaimana instrumen seperti *South Sudan Humanitarian Fund* mencoba mengintegrasikan berbagai sektor bantuan. Namun, fokus dalam studi ini sangat teknokratis, yaitu lokalisasi cenderung hanya dipandang sebagai alat administratif daripada pengakuan terhadap kedaulatan politik aktor lokal. Senada dengan hal tersebut, Mena & Hilhorst (2022) menawarkan perspektif dekolonial yang mengkritik pendekatan HDP yang sejauh ini gagal mewujudkan janji pendekatan *bottom-up*. Namun, cenderung mengabaikan bagaimana struktur kekuasaan global tetap mempertahankan kendali atas desain proyek. Analisis ekonomi politik bantuan diperdalam oleh Jansen (2017) melalui "*humanitarian protectorate*". Menunjukkan bahwa ruang kemanusiaan di Sudan Selatan menjadi arena politik tersendiri, yaitu bantuan internasional berperan sebagai pilar ekonomi yang berpotensi mempetahankan status quo konflik. Perspektif ini mengabaikan bagaimana strategi bertahan hidup lokal secara aktif mengonstruksi ulang praktik keamanan tersebut.

Di sisi lain, Lokosang et al. (2016) mengidentifikasi prediktor kerawanan pangan rumah tangga dan menekankan pentingnya kapasitas komunitas sebagai dasar kebijakan di wilayah dengan tata Kelola lemah. Namun, studi ini kurang menjelaskan ketegangan antara strategi bertahan hidup lokal dan logika intervensi internasional yang kaku. Demikian pula, Tappis et al. (2013) membahas tentang stratei rumah tangga di wilayah konflik yang menggambarkan pola konsumsi darurat. Namun, kurang menilai bagaimana intervensi *top-down* dapat secara tidak langsung melemahkan sistem pangan tradisional yang menopang resiliensi.

Kesenjangan literatur terletak pada minimnya integrasi pendekatan *top-down* dan *bottom-up* dalam kerangka *human security*, karena studi sebelumnya cenderung memisahkan efektivitas bantuan dan resiliensi komunitas. Tulisan ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis krisis pangan di Sudan Selatan sebagai hasil relasi kuasa antara aktor global dan lokal, sekaligus menempatkan masyarakat sebagai aktor aktif. Dengan demikian, krisis dipahami bukan sekadar masalah teknis, melainkan ketegangan antara intervensi universal dan praktik keamanan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berusaha menguraikan bahwa krisis pangan di Sudan Selatan tidak hanya dipengaruhi oleh konflik bersenjata, perubahan iklim, dan ketidakstabilan ekonomi, tetapi juga oleh dinamika relasi kuasa dalam tata kelola bantuan kemanusiaan. Dalam konteks ini, *human security* menjadi arena kontestasi antara aktor internasional dan masyarakat lokal dalam menentukan bentuk perlindungan, distribusi bantuan, serta definisi keamanan yang dianggap ideal. Oleh karena itu, pembahasan berikut akan menganalisis bagaimana pendekatan *top-down*

dan *bottom-up* berinteraksi, bertentangan, sekaligus saling bergantung dalam penanganan krisis pangan di Sudan Selatan.

Top-Down, Bottom-Up Approach, dan Krisis Pangan di Sudan Selatan

Ketahanan pangan atau *food security* bukan hanya tentang ketersediaan pasokan makanan di gudang, melainkan sebuah kondisi yang kompleks di mana semua orang memiliki akses, baik secara fisik maupun ekonomi, terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi (FAO, 2008). Dalam konteks Sudan Selatan, krisis pangan terjadi ketika salah satu atau lebih dari empat aspek utama dari ketahanan pangan yang mencakup ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan, mengalami gangguan yang serius. Salah satu hambatan besar dalam penanganan krisis ini adalah masalah dalam perbedaan cara mengukur ketidakamanan pangan. Indikator yang berbeda antara lembaga internasional sering menyebabkan keterlambatan dalam menentukan wilayah yang paling membutuhkan bantuan darurat, sehingga dalam banyak kasus bantuan datang setelah kondisi di wilayah tersebut mencapai tahap kerawanan pangan yang akut (Sumsion et al., 2023).

Krisis pangan di Sudan Selatan tidak hanya merupakan hasil gangguan teknis dalam sistem pangan, tetapi juga merupakan manifestasi dari kegagalan struktural negara dan relasi kekuasaan yang timpang. Konflik bersenjata yang berlangsung sejak 2013 tidak hanya menghancurkan kapasitas produksi pangan, tetapi juga mengubah struktur sosial dan ekonomi masyarakat secara mendalam (Thomas & De Waal, 2022). Dalam konteks ekonomi politik, konflik tersebut membentuk sistem distribusi sumber daya yang eksklusif, di mana akses terhadap pangan sering ditentukan oleh kelompok politik dan etnis.

Hal ini menunjukkan bahwa pangan tidak lagi sekadar komoditas ekonomi, tetapi juga menjadi salah satu instrumen kekuasaan dalam konflik (Seal & Bailey, 2013). Dalam kondisi ini, masyarakat kehilangan kedaulatan atas sistem produksi pangan, sehingga ketahanan pangan bergeser dari basis lokal menjadi ketergantungan pada bantuan eksternal.

Perselisihan antara kelompok etnis Dinka dan Nuer yang dipengaruhi oleh politik berbasis kepentingan kelompok dan kedekatan pribadi telah melemahkan hubungan sosial masyarakat desa (Koos & Gutschke, 2014). Konflik yang belum terselesaikan di wilayah perbatasan pasca-referendum juga mengubah lahan pertanian yang sebelumnya produktif menjadi zona konflik. Ladang-ladang ditinggalkan, hewan ternak dijarah sebagai bagian dari strategi perang, dan rantai pasokan bibit serta pupuk terganggu akibat ketidakamanan jalur transportasi (Cahyanti, 2017).

Ketika penduduk mengungsi, mereka kehilangan akses terhadap tanah leluhur yang menjadi sumber penghidupan utama. Kondisi tersebut menciptakan fenomena dimana masyarakat yang sebelumnya mampu memproduksi pangan secara mandiri namun, kini bergantung pada bantuan kemanusiaan yang terbatas (Putri & Munanjar, 2026).

Perubahan iklim dan faktor lingkungan turut menjadi ancaman yang membahayakan kelangsungan ketahanan pangan di Sudan Selatan. Dampak lingkungan tersebut tidak dapat dipisahkan dari konteks politik, karena kemampuan adaptasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh kapasitas negara dan distribusi sumber daya. Studi menunjukkan bahwa dalam negara yang rapuh, perubahan iklim berfungsi sebagai *threat multiplier* yang memperdalam konflik dan ketidakamanan pangan akibat lemahnya kapasitas institusional dalam merespons krisis (Thompson & Harris, 2021). Negara ini menghadapi kerentanan tinggi terhadap perubahan iklim yang semakin sulit untuk diprediksi. Sudan Selatan bahkan menempati peringkat ke-8 sebagai negara yang paling rentan terhadap krisis iklim di tingkat global (Lutvihana & Kusuma, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menghadapi ancaman keamanan akibat dari kekerasan dan instabilitas politik, tetapi juga tekanan lingkungan yang secara langsung mempengaruhi keberlangsungan hidup dan sistem pangan nasional.

Konflik internal tidak hanya menghancurkan stabilitas politik dan keamanan, tetapi juga melemahkan fondasi ekonomi nasional yang sebelumnya telah rapuh (Ibrahim & Mutiarin, 2020). Kondisi ini menciptakan "*humanitarian protectorate*", yaitu tata kelola negara sangat bergantung pada ekonomi bantuan internasional yang cenderung terpolitisasi (Jansen, 2017). Kondisi ini berdampak langsung terhadap kemiskinan yang meningkat, aktivitas ekonomi masyarakat

menurun, serta terbatasnya kemampuan negara dalam mempertahankan kestabilan pasar dan distribusi kebutuhan pokok. Meskipun pemerintah telah menyusun berbagai upaya penanggulangan melalui *National Adaptation Plan* (NAP), negara ini masih memiliki keterbatasan dalam kesiapan untuk menghadapi perubahan iklim.

Dampak paling nyata dapat dilihat pada tingginya inflasi dan menurunnya daya beli masyarakat. Akibat konflik berkepanjangan, Sudan Selatan mengalami kehilangan yang terus menumpuk dari waktu ke waktu dalam pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita riil sebesar 69,63% selama periode 2012-2018. Penurunan tersebut menunjukkan besarnya kerugian ekonomi yang dialami negara akibat instabilitas politik dan keamanan yang berkepanjangan. Pada tahun 2018, PDB per kapita riil Sudan Selatan bahkan hanya mencapai sekitar sepertiga dari jumlah yang seharusnya dapat dicapai apabila konflik tidak terjadi (Mawejje & McSharry, 2021). Ekonomi yang melemah memperdalam ketergantungan masyarakat pada bantuan eksternal, termasuk intervensi transfer tunai (Doocy et al., 2023). Dalam situasi kerawanan pangan akut, rumah tangga kehilangan aset produktif dan mencapai batas adaptasi, sehingga bergantung pada bantuan kemanusiaan. Tanpa stabilitas perdamaian, intervensi ini cenderung hanya menjadi solusi jangka pendek yang mempertahankan siklus ketergantungan dalam ekonomi politik Sudan Selatan.

Lemahnya tata kelola negara menjadi salah satu faktor utama yang semakin memperparah krisis pangan di Sudan Selatan. Kapasitas pemerintah yang terbatas dalam menangani konflik, menjaga stabilitas nasional, serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat menyebabkan penanganan krisis tidak berjalan dengan optimal (Mawejje & McSharry, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan pangan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti konflik dan perubahan iklim, tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya kemampuan institusional negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif. Hal ini diperburuk oleh warisan sejarah di mana hubungan antara masyarakat dengan pemerintah seringkali ditandai oleh ketegangan, dengan negara lebih sering hadir sebagai entitas yang cenderung menghukum daripada melayani, sehingga menimbulkan hambatan sistemik dalam penyampaian layanan dasar (Leonardi, 2013).

Struktur negara yang rapuh turut menjadi faktor yang memperbesar perkembangan konflik dan menghambat distribusi bantuan kemanusiaan secara efektif. Lemahnya tata kelola, rendahnya koordinasi kelembagaan, serta keterbatasan kapasitas pengelolaan pemerintahan menyebabkan berbagai program bantuan seringkali menghadapi kendala dalam realisasi kebijakan di lapangan. Kesulitan masyarakat dan lembaga internasional dalam berurusan dengan pemerintah berakar pada praktik kekuasaan yang cenderung informal dan tidak terkoordinasi, di mana otoritas formal seringkali dikesampingkan oleh jaringan elite politik (Leonardi, 2013). Selain itu, minimnya infrastruktur dan rendahnya kesiapan negara dalam menghadapi bencana alam menunjukkan lemahnya kemampuan internal negara dalam melindungi masyarakat dari ancaman menghadapi kelaparan. Ketergantungan ekonomi terhadap sektor minyak yang kerap menjadi sumber sengketa politik dan konflik juga memperlihatkan belum optimalnya pengembangan dari berbagai sektor ekonomi nasional (Cahyanti, 2017). Akibatnya, negara mengalami kesulitan dalam membangun sistem ekonomi dan ketahanan pangan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Pendekatan *top-down* dalam penanganan krisis pangan di Sudan Selatan banyak dilakukan melalui bantuan dari organisasi internasional, terutama lembaga yang berada di bawah PBB, organisasi kemanusiaan internasional, lembaga donor, serta pemerintah Sudan Selatan. Pendekatan ini berfokus pada pengambilan keputusan yang terpusat, di mana kebijakan dan program bantuan dirancang oleh institusi internasional maupun negara, kemudian diterapkan kepada masyarakat terdampak krisis. Dalam konteks Sudan Selatan, pendekatan ini menjadi salah satu mekanisme utama yang digunakan untuk mengurangi dampak langsung dari konflik bersenjata, bencana iklim, dan keruntuhan ekonomi yang menyebabkan meningkatnya kerawanan pangan.

Dalam praktiknya, pendekatan *top-down* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan kemanusiaan, tetapi juga sebagai bentuk *humanitarian governance* yang mengatur kehidupan masyarakat terdampak melalui distribusi bantuan, pengelolaan mobilitas penduduk,

serta penentuan wilayah prioritas krisis. Organisasi internasional dan donor memiliki otoritas besar dalam menentukan siapa yang dikategorikan rentan, kapan suatu kondisi dinyatakan sebagai darurat, serta jenis bantuan yang dianggap paling sesuai (Müller-Koné et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa intervensi kemanusiaan tidak sepenuhnya bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan politik, administratif, dan ekonomi aktor internasional.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya relasi kekuasaan dalam praktik bantuan internasional. Donor cenderung memiliki peran dominan dalam menentukan prioritas program, alokasi pendanaan, hingga arah kebijakan bantuan (Müller-Koné et al., 2024). Akibatnya, kebutuhan yang direspons tidak selalu sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata masyarakat lokal, melainkan disesuaikan dengan agenda global dan kerangka kerja institusi internasional.

Salah satu aktor utama yang berperan dalam implementasi pendekatan ini ialah WFP. Mendistribusikan bantuan pangan kepada jutaan masyarakat yang mengalami kelaparan akut akibat konflik dan gangguan produksi pangan, merupakan peran dari WFP. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk bahan makanan pokok, bantuan tunai, maupun dukungan logistic ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Dalam situasi darurat, bantuan WFP menjadi sangat penting karena banyak masyarakat yang kehilangan akses terhadap lahan pertanian, pasar, maupun sumber pendapatan akibat perang yang berkepanjangan (WFP, 2025). Selain itu, distribusi bantuan pangan juga dilakukan kepada masyarakat pengungsi yang menetap di kamp perlindungan sipil serta wilayah yang mengalami dampak akibat banjir dan kekeringan.

Selain WFP, adapun FAO yang menjalankan berbagai program ketahanan pangan untuk mendukung pemulihan sektor pertanian masyarakat. Program yang dilakukan meliputi distribusi benih, alat pertanian, bantuan ternak, hingga pelatihan teknik pertanian sederhana bagi masyarakat lokal. Bantuan tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat mempertahankan produksi pangan di tengah konflik dan perubahan iklim yang terus memperburuk kondisi pertanian (FAO, 2026). PBB bersama organisasi kemanusiaan lainnya juga menjalankan bantuan kesehatan, penyediaan air bersih, perlindungan anak, serta layanan dasar bagi masyarakat rentan sebagai bagian dari respons kemanusiaan yang terintegrasi.

Pendekatan *top-down* pada dasarnya berfokus pada penanganan darurat dan stabilisasi situasi dalam jangka pendek. Dalam kondisi krisis yang sangat parah, bantuan cepat dari organisasi internasional menjadi penting untuk mencegah meningkatnya angka kematian akibat kelaparan. Kebijakan kemanusiaan internasional umumnya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, perlindungan, dan layanan kesehatan dalam situasi darurat (Tientcheu, 2022). Pendekatan ini juga bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah meluasnya dampak dari konflik ke wilayah lain. Oleh karena itu, bantuan internasional sering difokuskan pada distribusi bantuan secara cepat dan penguatan koordinasi antara lembaga kemanusiaan.

Meskipun memiliki peran penting dalam mengurangi dampak langsung dari krisis, implementasi pendekatan *top-down* menghadapi berbagai hambatan struktural. Salah satu hambatan utama ialah prosedur kelembagaan yang berlapis dalam proses distribusi bantuan. Banyaknya aktor yang terlibat, mulai dari pemerintah, organisasi internasional, lembaga donor, hingga NGO, sering menyebabkan koordinasi berjalan lambat. Proses administrasi yang panjang berdampak pada bantuan kemanusiaan tidak selalu dapat segera menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Adapun konflik bersenjata yang terus berlangsung menyebabkan akses menuju wilayah terdampak menjadi sangat terbatas. Banyak daerah sulit dijangkau akibat ancaman kekerasan, kerusakan infrastruktur, dan penutupan akses oleh kelompok bersenjata.

Hambatan lainnya ialah tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan internasional. Dalam kondisi konflik yang berkepanjangan, masyarakat seringkali bergantung pada bantuan pangan karena telah kehilangan kemampuan untuk memproduksi pangan secara mandiri. Ketergantungan ini menyebabkan masyarakat menjadi rentan ketika bantuan internasional mengalami pengurangan akibat keterbatasan pendanaan atau hambatan distribusi. Situasi tersebut menunjukkan bahwa bantuan darurat memang mampu mengurangi dampak langsung krisis, tetapi belum cukup untuk membangun sistem pangan yang mandiri dan berkelanjutan.

Selain itu, pendekatan *top-down* dinilai belum mampu menyelesaikan akar konflik yang menjadi penyebab utama krisis pangan di Sudan Selatan. Konflik politik, perebutan kekuasaan, ketegangan etnis, serta lemahnya tata kelola negara tetap menjadi faktor utama yang menghambat terciptanya stabilitas pangan. Intervensi internasional cenderung gagal terhubung dengan kebutuhan masyarakat lokal karena terlalu berorientasi pada struktur formal dan pendekatan yang bersifat universal (Richmond, 2011). Kurangnya pemahaman terhadap kondisi lokal menyebabkan intervensi internasional belum mampu mendukung pembangunan perdamaian secara optimal (Mac Ginty & Firchow, 2016).

Banyak bantuan internasional lebih menekankan prosedur teknis dan standar administratif dibandingkan memahami kondisi sosial masyarakat yang terdampak konflik. Akibatnya, program yang dijalankan sering tidak sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat di lapangan (Autesserre, 2014). Dalam konteks Sudan Selatan, kondisi ini menyebabkan berbagai program bantuan hanya mampu meredakan dampak krisis dalam jangka pendek tanpa benar-benar memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Dengan demikian, pendekatan *top-down* memiliki kontribusi besar dalam mencegah memburuknya krisis pangan melalui bantuan kemanusiaan darurat dan stabilisasi situasi. Namun, pendekatan ini juga menunjukkan keterbatasan yang signifikan, mulai dari dominasi aktor internasional dalam menentukan agenda bantuan, potensi terciptanya ketergantungan (*dependency*) hingga ketidakmampuannya dalam menyelesaikan akar struktural krisis.

Di sisi lain, pendekatan *bottom-up* dalam penanganan krisis pangan di Sudan Selatan menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam mempertahankan keberlangsungan hidup mereka. Pendekatan ini berkembang dari kemampuan komunitas untuk beradaptasi terhadap konflik, ketidakstabilan ekonomi, serta keterbatasan bantuan eksternal (Alinovi et al., 2007).

Munculnya berbagai strategi bertahan hidup (*survival mechanism*) berbasis komunitas menunjukkan bahwa masyarakat Sudan Selatan tidak sepenuhnya bergantung pada negara maupun organisasi internasional. Dalam situasi ketika negara gagal memberikan perlindungan yang efektif, komunitas lokal justru membangun mekanisme keamanan mereka sendiri melalui solidaritas sosial, sistem berbagi pangan, serta strategi adaptasi ekonomi. Kondisi ini menegaskan bahwa masyarakat bukanlah korban pasif (Sassi, 2021), melainkan aktor yang turut aktif dalam menangani ketidakamanan struktural yang mereka hadapi. Dalam konteks konflik di Sudan Selatan, praktik-praktik ini juga berkembang karena sejarah panjang dari *violent governance* yang menjadikan masyarakat sebagai objek kontrol sekaligus sumber daya dalam konflik, sehingga masyarakat sipil terdorong untuk menciptakan mekanisme perlindungan alternatif di tingkat lokal (Kindersley & Rolandsen, 2019).

Lebih lanjut, munculnya komunitas sebagai aktor keamanan juga berkaitan dengan kegagalan negara dalam menyediakan keamanan yang stabil, di mana struktur politik yang bersifat *political marketplace* (sistem di mana kekuasaan dan dukungan politik diperjualbelikan seperti komoditas di pasar) mendorong aktor-aktor elit untuk memprioritaskan loyalitas politik dan kekerasan dibanding perlindungan masyarakat (Thomas & De Waal, 2022). Dalam kondisi tersebut, banyak komunitas di tingkat lokal memilih untuk menarik diri dari struktur negara dan mengandalkan kapabilitas mereka sendiri untuk bertahan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa konsep keamanan lokal yang berkembang di Sudan Selatan berbeda dengan konsep keamanan universal yang dibangun oleh aktor internasional, karena lebih kontekstual, berbasis pengalaman sehari-hari, dan berorientasi pada keberlangsungan hidup dari komunitas itu sendiri.

Salah satu bentuk implementasi pendekatan *bottom-up* terlihat melalui sistem berbagi pangan antar keluarga dan komunitas. Dalam kondisi kelangkaan pangan, masyarakat saling membantu dengan membagikan hasil panen, bahan makanan, maupun sumber daya lainnya kepada anggota komunitas yang paling rentan. Solidaritas sosial ini menjadi salah satu cara paling penting untuk menjaga keberlangsungan hidup masyarakat di tengah keterbatasan bantuan formal. Selain itu, masyarakat tetap mempertahankan praktik pertanian tradisional sebagai sumber utama pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari (Arensen & OXFAM, 2017). Meskipun produksi pertanian sering terganggu akibat konflik dan perubahan iklim, praktik mengelola lahan

pertanian sederhana tetap menjadi strategi utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga.

Komunitas lokal juga mengembangkan berbagai strategi adaptasi untuk menghadapi krisis yang berkepanjangan. Salah satunya yaitu perluasan sumber pendapatan. Masyarakat tidak hanya bergantung pada pertanian, tetapi juga menggabungkannya dengan aktivitas lain seperti beternak, berdagang kecil, mencari hasil hutan, hingga pekerjaan informal untuk memperoleh penghasilan tambahan. Pengembangan variasi sumber pendapatan ini dilakukan untuk mengurangi resiko kehilangan sumber pendapatan ketika konflik atau bencana mengganggu salah satu sektor ekonomi masyarakat.

Pendekatan *bottom-up* dianggap lebih memahami kebutuhan masyarakat karena dibangun berdasarkan pengalaman langsung komunitas yang terdampak. Masyarakat lokal memiliki kapasitas dan peran penting dalam membangun perdamaian serta mempertahankan kehidupan sosial mereka sendiri (Richmond, 2011). Oleh sebab itu, keterlibatan masyarakat lokal menjadi penting karena mereka memahami kondisi lingkungan, budaya, serta kebutuhan dari komunitas secara lebih mendalam dibanding aktor eksternal.

Namun demikian, implementasi dari pendekatan *bottom-up* tetap menghadapi berbagai keterbatasan. Konflik berkepanjangan menyebabkan kapasitas masyarakat lokal menjadi semakin lemah akibat kehilangan lahan pertanian, ternak, infrastruktur, dan sumber penghidupan lainnya. Selain itu, keterbatasan dana dan minimnya dukungan negara membuat komunitas lokal sulit mengembangkan sistem pangan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Banyak masyarakat juga tidak memiliki akses terhadap teknologi pertanian, modal usaha, maupun layanan dasar yang memadai.

Pendekatan berbasis lokal cenderung masih menghadapi ketimpangan kekuasaan karena proses pengambilan keputusan tetap didominasi oleh aktor internasional (Müller-Koné, Meininghaus, Kemmerling, & Haidara, 2024). Dalam beberapa kasus, komunitas lokal hanya dilibatkan sebagai pelaksana program tanpa memiliki pengaruh besar terhadap perencanaan kebijakan. Selain itu, aktivitas perdamaian di tingkat lokal sering dipandang sensitif secara politik sehingga pelaksanaannya di wilayah konflik menjadi kurang optimal.

Kesenjangan antara Pendekatan *Top-Down* dan *Bottom-Up*

Krisis pangan yang terjadi di Sudan Selatan menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara pendekatan *top-down* dan *bottom-up* dalam penanganannya. Pendekatan *top-down* yang dijalankan oleh pemerintahan, organisasi internasional, dan lembaga donor memiliki kapasitas besar dalam menyediakan bantuan kemanusiaan secara luas, namun cenderung bersifat administratif, teknokratis, dan tidak sepenuhnya responsif terhadap dinamika lokal. Intervensi pemerintah dalam banyak kasus masih terhambat oleh kepentingan elite politik, sebagaimana tercermin dalam blokade bantuan FAO pada tahun 2014 yang dimanfaatkan sebagai instrumen dalam konflik internal (Cyndy, 2019). Selain itu efektivitas bantuan juga dilemahkan oleh *politics of knowledge*, di mana keahlian teknis internasional lebih diprioritaskan dibandingkan pemahaman mendalam tentang konteks lokal, sehingga kebijakan yang dihasilkan cenderung seragam dan kurang adaptif terhadap realitas lapangan (Ginty, 2011).

Kesenjangan tersebut semakin terlihat dari tidak terintegrasinya kebijakan internasional dengan kebutuhan masyarakat lokal. Bantuan kemanusiaan umumnya dirancang berdasarkan standar universal lembaga donor, sementara masyarakat lokal memiliki kebutuhan yang beragam sesuai kondisi sosial, budaya, dan tingkat kerentanan masing-masing komunitas. Perbedaan prioritas ini menciptakan ketidaksesuaian antara fokus aktor internasional yang menekankan stabilisasi, distribusi bantuan darurat, dan pengurangan dampak krisis secara cepat, dengan kebutuhan masyarakat yang lebih berorientasi pada *everyday security* seperti akses pangan berkelanjutan, perlindungan komunitas, dan pemulihan mata pencaharian. Dalam konteks ini, *human security* tidak lagi sekadar pendekatan perlindungan, tetapi bertransformasi menjadi alat tata kelola kemanusiaan yang mengatur kehidupan melalui mekanisme bantuan yang kaku dan berbasis kategorisasi kerentanan (Richmond, 2011).

Di sisi lain, pendekatan *bottom-up* menunjukkan bahwa masyarakat lokal bukanlah aktor pasif, tetapi berperan sebagai pelaku utama dalam menjaga keberlangsungan hidup mereka.

Melalui berbagai *coping strategies*, solidaritas komunitas, serta sistem berbagi pangan tradisional, masyarakat mampu membangun mekanisme bertahan hidup di tengah kegagalan institusi formal (Alinovi et al., 2007). Namun, peran masyarakat lokal ini seringkali bertabrakan dengan pendekatan internasional yang bersifat "*template*". Kegagalan intervensi seringkali tidak disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, melainkan oleh pengabaian terhadap peran masyarakat lokal, yang pada akhirnya memicu resistensi, ketidakpercayaan, dan rendahnya rasa *local ownership* (Autesserre, 2014).

Kesenjangan ini juga diperparah oleh partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan yang masih sangat terbatas. Dalam banyak program kemanusiaan, masyarakat lokal hanya menjadi penerima bantuan dan tidak dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan maupun evaluasi program. Tata kelola kemanusiaan atau *humanitarian governance* seringkali terjebak dalam *politics of dependency*, di mana bantuan kemanusiaan menciptakan ketergantungan struktural alih-alih membangun kapasitas lokal (Mulder, 2023). Meskipun bantuan darurat menyelamatkan nyawa dalam jangka pendek, pendekatan *top-down* yang dominan cenderung melemahkan kapasitas produksi lokal dan merusak sistem pangan tradisional. Autesserre (2014) menyebutkan bahwa kurangnya *local ownership* dalam campur tangan pihak internasional dapat memunculkan rasa tidak percaya, resistensi, dan rendahnya efektivitas program perdamaian maupun bantuan kemanusiaan.

Kesenjangan antara pendekatan *top-down* dan *bottom-up* berdampak pada keberlanjutan program penanganan krisis pangan. Banyak program bantuan hanya berjalan selama masa darurat dan tidak mampu membangun ketahanan pangan berkelanjutan. Ketika bantuan internasional berkurang, masyarakat Kembali menghadapi kerentanan yang sama akibat lemahnya sistem ekonomi dan pertanian lokal. Pendekatan *Humanitarian-Development-Peace Nexus* (HDP) masih didominasi oleh implementasi dari atas ke bawah sehingga janji pendekatan berbasis lokal belum sepenuhnya tercapai (Müller-Koné et al., 2024). Muncul sebuah "paradoks lokalisasi" di mana aktor internasional berusaha memindahkan kekuasaan secara formal namun tetap mempertahankan kendali teknokratis dan control melalui pengawasan (Mulder, 2023). Hal ini menyebabkan program bantuan seringkali terhenti saat masa darurat berakhir tanpa membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Analisis Human Security terhadap Masa Depan Penanganan Krisis Pangan

Dari perspektif *human security*, ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan komoditas, tetapi juga menyangkut perlindungan martabat manusia dan akses berkelanjutan terhadap sumber daya. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk menjamin aksesibilitas dan kualitas pangan sebagai bagian dari hak dasar manusia. Namun, dalam praktiknya, tata kelola kemanusiaan di Sudan Selatan justru memperlihatkan bagaimana bantuan menjadi bagian dari relasi kuasa yang lebih luas. Intervensi kemanusiaan saat ini telah berubah menjadi mode politik untuk mengendalikan wilayah dan kehidupan masyarakat melalui mekanisme bantuan yang seringkali mengabaikan kedaulatan masyarakat lokal (De Lauri, 2016). Intervensi ini dapat dipahami sebagai praktik pengelolaan kehidupan masyarakat, di mana aktor internasional menentukan komunitas yang diprioritaskan melalui pengendalian atas distribusi pangan dan sumber daya (Foucault, 1977).

Masa depan penanganan krisis pangan memerlukan perubahan pendekatan. Sangat penting untuk menghubungkan kebijakan internasional dengan kebutuhan nyata masyarakat di tingkat lokal. Integrasi ini menuntut pergeseran dari hanya sekedar memberikan bantuan darurat, menuju bantuan pembangunan preventif yang berfokus pada pencegahan krisis sejak awal, bukan hanya menangani dampaknya setelah krisis memburuk (UNDP, 1994). Selama ini, kebijakan kerap dibuat di tingkat global namun sulit diterapkan di lapangan karena tidak sesuai dengan kondisi komunitas setempat yang terdampak. Oleh karena itu, koordinasi dari organisasi internasional dengan pengetahuan lokal merupakan kunci agar bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran.

Pendekatan *human security* yang ideal haruslah bersifat *people-centered*, yang berarti menempatkan perlindungan individu di atas keamanan teritorial atau kepentingan elit politik. Berdasarkan kerangka pembangunan manusia berkelanjutan, pendekatan ini harus partisipatif

yaitu melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, juga berkelanjutan dengan berupaya mengatasi sumber utama krisis, seperti kegagalan institusional dan kerentanan ekonomi. Tanpa perhatian pada akar struktural ini, intervensi pangan hanya akan menjadi solusi sementara yang tidak mampu memutus rangkaian kelaparan kronis.

Namun, narasi umum bahwa pendekatan *top-down* kurang efektif sementara *bottom-up* lebih memahami masyarakat perlu dikembangkan secara analitik dimana, krisis pangan yang berkepanjangan di Sudan Selatan merupakan manifestasi dari *human security* yang dipraktikkan sebagai arena kontestasi antara tata kelola kemanusiaan internasional yang teknokratis dengan agensi lokal yang berbasis pada pengalaman hidup masyarakat. Dalam arena kontestasi ini, kegagalan penanganan krisis bukan semata-mata disebabkan oleh kurangnya bantuan, melainkan adanya benturan antara keamanan universal yang dipahami dan dibawa oleh aktor eksternal dengan keamanan kontekstual yang dipraktikkan masyarakat lokal (Richmond, 2011).

Untuk memperkuat ketahanan pangan di masa depan, disarankan adanya peningkatan partisipasi masyarakat lokal yang signifikan, bukan sekadar keterlibatan formalitas dalam struktur hierarki. Penguatan kapasitas komunitas harus menjadi prioritas agar mereka memiliki agensi untuk mengelola sumber daya pangan secara mandiri. Selain itu, diperlukan kolaborasi antara aktor internasional dan aktor lokal melalui penataan ulang hubungan kekuasaan dalam sektor bantuan. Penanganan krisis pangan harus bertransformasi dari hanya respons darurat jangka pendek menjadi berfokus pada pembangunan jangka panjang yang dapat memperkuat sistem perlindungan sosial tradisional dan kapasitas produksi dalam negeri.

Dengan demikian, krisis pangan di Sudan Selatan tidak hanya diproduksi oleh konflik dan kelangkaan sumber daya, tetapi juga oleh tidak selarasnya logika intervensi internasional yang teknokratis dengan logika bertahan hidup masyarakat lokal (*local survival logic*). Sistem kemanusiaan ini seringkali beroperasi sebagai sebuah "bisnis kemanusiaan" yang menciptakan sirkuit ketergantungan struktural, di mana bantuan darurat justru memperlemah kapasitas produksi tradisional dan memperkuat dominasi donor terhadap kebijakan domestik (De Lauri, 2016). Dampaknya terlihat pada keberlanjutan program yang lemah, di mana banyak intervensi yang efektif dalam jangka pendek dan belum mampu membangun ketahanan pangan jangka panjang. Ketika bantuan menurun, masyarakat kembali menghadapi kerentanan yang sama akibat lemahnya sistem produksi lokal.

Oleh karena itu, penyelesaian krisis pangan tidak dapat mengandalkan satu pendekatan saja, melainkan memerlukan integrasi antara kapasitas struktural dari pendekatan *top-down* dan pengetahuan kontekstual dari pendekatan *bottom-up*. Pergeseran menuju strategi yang lebih memberdayakan dan berkelanjutan menjadi penting, termasuk melalui penguatan sistem pangan lokal, pembangunan infrastruktur, serta pengakuan terhadap otoritas tradisional seperti *chiefship* dalam pengelolaan sumber daya (Kindersley & Rolandsen, 2019). Keterlibatan aktif masyarakat bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi syarat mutlak untuk menciptakan kedaulatan pangan yang inklusif dan responsif terhadap identitas sosial serta budaya masyarakat Sudan Selatan. Tanpa integrasi tersebut, intervensi hanya akan memproduksi siklus ketergantungan dan menghambat tercapainya *human security* secara substantif.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa krisis pangan di Sudan Selatan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai akibat dari konflik, perubahan iklim, atau keterbatasan sumber daya, melainkan sebagai hasil dari konfigurasi relasi kekuasaan yang membentuk tata kelola krisis kemanusiaan itu sendiri. Ketidaksinkronan antara pendekatan *top-down* dan *bottom-up* tidak hanya mencerminkan perbedaan teknis dalam implementasi kebijakan, tetapi juga memperlihatkan adanya hierarki kekuasaan antara aktor global dan lokal dalam menentukan definisi kebutuhan, prioritas intervensi, serta bentuk solusi yang dianggap resmi.

Pendekatan *top-down*, yang didominasi oleh organisasi internasional dan lembaga donor, tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme bantuan kemanusiaan, tetapi juga sebagai instrumen *humanitarian governance* yang mengatur distribusi sumber daya, mobilitas bantuan, serta

kategorisasi kerentanan masyarakat. Dalam praktiknya, intervensi ini cenderung mereproduksi ketergantungan struktural dengan menempatkan masyarakat lokal sebagai objek penerima bantuan, bukan sebagai subjek pengambil keputusan. Di sisi lain, pendekatan *bottom-up* menunjukkan bahwa masyarakat lokal memiliki kapasitas agensi melalui berbagai *survival mechanisms* berbasis komunitas. Namun, kapasitas ini secara sistematis dibatasi oleh struktur kekuasaan global yang menentukan akses terhadap sumber daya, legitimasi pengetahuan lokal, serta ruang partisipasi dalam proses pengambilan kebijakan.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan konsep *human security* dengan menempatkannya tidak hanya sebagai kerangka normatif yang berorientasi pada perlindungan individu, tetapi juga sebagai arena politik yang sarat dengan relasi kuasa. Dalam konteks ini, keamanan manusia bukan sekadar tentang siapa yang dilindungi, tetapi juga tentang siapa yang memiliki otoritas untuk mendefinisikan ancaman, menentukan bentuk intervensi, dan mengontrol distribusi bantuan. Dengan demikian, krisis pangan di Sudan Selatan dapat dipahami sebagai produk dari ketegangan antara logika intervensi global yang bersifat universal dan praktik lokal yang kontekstual.

Implikasi dari temuan ini menekankan perlunya transformasi mendasar dalam pendekatan penanganan krisis, dari model yang bersifat *top-down* dan depolitis menjadi pendekatan yang mengakui dimensi kekuasaan dalam tata kelola kemanusiaan. Integrasi melalui kerangka *Humanitarian-Development-Peace Nexus (HDP)* perlu diarahkan tidak hanya pada koordinasi program, tetapi juga pada redistribusi kekuasaan dengan memperluas *local ownership*, memperkuat legitimasi pengetahuan lokal, serta membuka ruang partisipasi yang lebih substantif bagi masyarakat terdampak.

Untuk penelitian selanjutnya, diperlukan pendekatan yang lebih kritis dan reflektif dalam menganalisis dinamika ketahanan pangan, khususnya terkait bagaimana relasi donor dengan penerima bantuan membentuk pola ketergantungan jangka panjang, bagaimana kategori kerentanan diproduksi dalam praktik kemanusiaan, serta bagaimana *local agency* dinegosiasikan dalam struktur kekuasaan global yang tidak setara. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkaya analisis *human security* dengan menempatkannya dalam konteks politik yang lebih luas, sekaligus membuka ruang bagi formulasi kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan.

REFERENCES

- Alinovi, L., Hemrich, G., & Russo, L. (2007). *Addressing Food Insecurity in Fragile States: Case Studies from the Democratic Republic of the Congo, Somalia and Sudan*. www.fao.org/es/esa
- Angel, M., & Carrel, P. (2022, June 13). *World Food Programme suspends some food aid in South Sudan as funds dry up* / Reuters. Reuters. <https://www.reuters.com/world/africa/world-food-programme-suspends-some-food-aid-south-sudan-funds-dry-up-2022-06-14/>
- Arensen, M., & OXFAM. (2017). *Indigenous Solutions to Food Insecurity: Wild Food Plants of South Sudan* / Library. <https://docs.southsudanngoforum.org/research/report/indigenous-solutions-food-insecurity-wild-food-plants-south-sudan?>
- Autesserre, S. (2014). Peaceland: Conflict resolution and the everyday politics of international intervention. *Peaceland: Conflict Resolution and the Everyday Politics of International Intervention*, 1–329. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107280366>
- Boer, M. den, & Wilde, J. de. (2008). *Top-Down and Bottom-Up Approaches to Human Security*. In *The Viability of Human Security*. Amsterdam University Press. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt46mxmt.3>
- Cahyanti, P. (2017). Analisis Konflik Sudan dan Sudan Selatan Pasca Referendum Pemisahan Diri Sudan Selatan dari Sudan. *Journal of International Relations*, 84–85. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>
- Cyndy, C. N. (2019). *Analisis Tindakan Pemerintah Sudan Selatan Menghalangi Bantuan Food and Agriculture Organization (FAO) terhadap Krisis Pangan di Tahun 2014*. <http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/41243>
- De Lauri, A. (2016). *The Politics of Humanitarianism*. *I.B.Tauris*, 11–22. www.ibtauris.com

- Doocy, S., Lyles, E., Morjan, R. K., Pfieffer-Mundt, K., Robinson, C., & Savage, K. (2023). Cash for assets during acute food insecurity: an observational study in South Sudan. *Agriculture & Food Security* 12:1, 12(1), 25-. <https://doi.org/10.1186/S40066-023-00431-7>
- FAO. (2008). *An Introduction to the Basic Concepts of Food Security*. www.foodsec.org
- FAO. (2026). *Programmes and projects / FAO in South Sudan / Food and Agriculture Organization of the United Nations*. <https://www.fao.org/south-sudan/programmes-and-projects/en/>
- Foucault, M. (1977). *Power/Knowledge* (C. Gordon, Ed.). https://monoskop.org/images/5/5d/Foucault_Michel_Power_Knowledge_Selected_Interviews_and_Other_Writings_1972-1977.pdf
- Ginty, R. Mac. (2011). *International Peacebuilding and Local Resistance*. <https://doi.org/10.1057/9780230307032preview>
- Ibrahim, A. H., & Mutiarin, D. (2020). The Major Factors behind the Economic and Financial Crisis in Sudan. *Saudi Journal of Economics and Finance*, 4(12), 597–601. <https://doi.org/10.36348/sjef.2020.v04i12.007>
- IPC. (2026). *IPC_SouthSudan_Projection_update_Acute_Food_Insecurity_Malnutrition_April_July2026_Report*.
- Jansen, B. J. (2017). The humanitarian protectorate of South Sudan? Understanding insecurity for humanitarians in a political economy of aid. *The Journal of Modern African Studies*, 55(3), 349–370. <https://doi.org/10.1017/S0022278X17000271>
- Jyalita, V. V. H. (2023). The Relevance of Human Security Approach in Assessing The Causes and Solutions to Food Insecurity in South Sudan (Case Study: South Sudan 2017 Famine). *Jurnal Sentris*, 4(1), 73–85. <https://doi.org/10.26593/sentris.v4i1.5116.73-85>
- Kindersley, N., & Rolandsen, Ø. H. (2019). Who Are The Civilians In The Wars of South Sudan? *Security Dialogue*, 50(5), 383–397. <https://doi.org/10.1177/0967010619863262>
- Koos, C., & Gutschke, T. (2014). South Sudan's Newest War: When Two Old Men Divide a Nation. *GIGA Focus*. www.giga-hamburg.de/giga-focus
- Leonardi, C. (2013). Eastern Africa Series DEALING WITH GOVERNMENT IN SOUTH SUDAN. *Eastern Africa Series*, 1–11.
- Lokosang, L. B., Ramroop, S., & Zewotir, T. (2016). The effect of weakened resilience on food insecurity in protracted crisis: The case of South Sudan. *Agriculture and Food Security*, 5(1). <https://doi.org/10.1186/s40066-016-0051-y>
- Lutvihana, Y., & Kusuma, A. S. (2023). Mengurai Proses Sekuritisasi Krisis Iklim di Sudan Selatan Tahun 2016-2021. *Jurnal Hubungan Internasional*, 16.
- Mac Ginty, R., & Firchow, P. (2016). Top-down and bottom-up narratives of peace and conflict. *Politics*, 36(3), 308–323. <https://doi.org/10.1177/0263395715622967>
- Mawejje, J., & McSharry, P. (2021). The economic cost of conflict: Evidence from South Sudan. *Review of Development Economics*, 25(4), 1969–1990. <https://doi.org/10.1111/rode.12792>
- Mena, R., & Hilhorst, D. (2022). Path dependency when prioritising disaster and humanitarian response under high levels of conflict: a qualitative case study in South Sudan. *Journal of International Humanitarian Action* 2022 7:1, 7(1), 5-. <https://doi.org/10.1186/S41018-021-00111-W>
- Mulder, F. (2023). The paradox of externally driven localisation: a case study on how local actors manage the contradictory legitimacy requirements of top-down bottom-up aid. *Journal of International Humanitarian Action*, 8(1). <https://doi.org/10.1186/s41018-023-00139-0>
- Müller-Koné, M., Meininghaus, E., Kemmerling, B., & Haidara, B. (2024). *How can the Humanitarian Development Peace Nexus Work from the Bottom Up?*
- Putri, G. A., & Munanjar, A. (2026). Krisis Pangan di Sudan 2023-2024 Dampak Konflik Terhadap Ketahanan Pangan dan Situasi Kemanusiaan. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*. <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu>
- Richmond, O. P. (2011). *A Post-Liberal Peace*.
- Sassi, M. (2021). Coping Strategies of Food Insecure Households in Conflict Areas: The Case of South Sudan. *Sustainability* 2021, Vol. 13, Page 8615, 13(15), 8615. <https://doi.org/10.3390/SU13158615>

- Seal, A., & Bailey, R. (2013). The 2011 Famine in Somalia: Lessons learnt from a failed response? *Conflict and Health*, 7(1). <https://doi.org/10.1186/1752-1505-7-22>
- Sumsion, R. M., June, H. M., & Cope, M. R. (2023). Measuring Food Insecurity: The Problem with Semantics. *Foods*, 12(9). <https://doi.org/10.3390/foods12091816>
- Tappis, H., Doocy, S., Paul, A., & Funna, S. (2013). Food security and development in South Sudan: a call to action. *Public Health Nutrition*, 16(9), 1631–1636. <https://doi.org/10.1017/S1368980013000669>
- Thomas, E., & De Waal, A. (2022). Hunger in Sudan's Political Marketplace. *World Peace Foundation*.
- Thompson, B. S., & Harris, J. L. (2021). Changing environment and development institutions to enable payments for ecosystem services: The role of institutional work. *Global Environmental Change*, 67, 102227. <https://doi.org/10.1016/J.GLOENVCHA.2021.102227>
- Tientcheu, V. T. L. (2022). *Politics and Policies of Humanitarianism and Development*.
- Tschunkert, K., Delgado, C., Murugani, V., & Riquier, M. (2023). *Financing Food Security: Promises and Pitfalls of the Humanitarian–Development–Peace Nexus in South Sudan*. <https://doi.org/10.55163/EMWF5600>
- UN. (2025). *FAO scales up emergency response with seed distribution campaign targeting 7.5 million people | United Nations in Sudan*. <https://sudan.un.org/en/297221-fao-scales-emergency-response-seed-distribution-campaign-targeting-75-million-people>
- UNDP. (1994). *HUMAN DEVELOPMENT REPORT 1994*.
- WFP. (n.d.-a). *Hunger intensifies in South Sudan as 7.8 million people face high acute food insecurity and 2.2 million children suffer acute malnutrition | World Food Programme*. WFP. Retrieved May 8, 2026, from <https://www.wfp.org/news/hunger-intensifies-south-sudan-78-million-people-face-high-acute-food-insecurity-and-22?>
- WFP. (n.d.-b). *Millions risk losing access to humanitarian food assistance amid funding slowdown in South Sudan | World Food Programme*. WFP. Retrieved May 8, 2026, from <https://www.wfp.org/news/millions-risk-losing-access-humanitarian-food-assistance-amid-funding-slowdown-south-sudan?>
- WFP. (n.d.-c). *South Sudan | World Food Programme*. WFP. Retrieved May 8, 2026, from <https://www.wfp.org/emergencies/south-sudan-emergency?>
- WFP. (n.d.-d). *WFP airdrops food to prevent catastrophe as hunger surges in conflict-hit parts of South Sudan | World Food Programme*. WFP. Retrieved May 8, 2026, from <https://www.wfp.org/news/wfp-airdrops-food-prevent-catastrophe-hunger-surges-conflict-hit-parts-south-sudan?>